



PERBEKEL TALIBENG
KABUPATEN KARANGASEM

PERATURAN DESA TALIBENG
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL TALIBENG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang

Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dana Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penataan Desa;
 28. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 29. Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 30. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 14);

31. Peraturan Desa Talibeng Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2018 Nomor 5);
32. Peraturan Desa Talibeng Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2028 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2022 Nomor 3);
33. Peraturan Desa Talibeng Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2022 Nomor 6);
34. Peraturan Desa Talibeng Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TALIBENG

Dan

PERBEKEL TALIBENG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. 3.066.177.990,00 |
| 2. Belanja Desa | <u>Rp. 3.464.654.611,23</u> |
| Surplus/defisit | Rp. (398.476.621,23) |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan pembiayaan Rp. | 498.476.621,23 |
| b. Pengeluaran pembiayaan Rp. | 100.000.000,00 |
| Selisih pembiayaan (a-b) Rp. | 398.476.621,23 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Bersekala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Talibeng.

Ditetapkan di Talibeng
pada tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Talibeng
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DESA TALIBENG

A handwritten signature in black ink, appearing to be "I Kadek Agus Hendrawan Andika Permana".

I KADEK AGUS HENDRAWAN ANDIKA PERMANA

LEMBARAN DESA TALIBENG TAHUN 2023 NOMOR 6

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TALIBENG
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.490.590,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.063.687.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.066.177.990,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	955.066.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.794.112.746,23	
5.3.	Belanja Modal	640.395.865,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	75.080.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.464.654.611,23	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(398.476.621,23)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	498.476.621,23	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	498.476.621,23	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	398.476.621,23	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

29 December 2023
 Perbekel Desa Talibeng

 I Ketut Mudlaga

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA TALIBENG
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TALIBENG
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.490.590,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.063.687.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.066.177.990,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.300.314.012,12</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.158.387.590,21	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.027.600,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	72.027.600,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	687.618.400,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	687.618.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	49.920.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	49.920.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	149.351.357,51	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	149.351.357,51	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	52.500.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	52.500.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	9.560.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.560.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	17.559.812,70	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.559.812,70	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.850.420,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.850.420,00	
1.1.90		Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali	93.000.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	93.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	57.399.923,89	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	17.637.500,00	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	212.500,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	17.425.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	26.647.423,89	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.647.423,89	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	13.115.000,00	ADD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.500,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	13.057.500,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	28.364.498,02	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4.751.065,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.751.065,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	19.396.065,00	ADD, DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.396.065,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	994.500,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	994.500,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.222.868,02	ADD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.222.868,02	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	29.162.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.625.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.625.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.222.500,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.222.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.320.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	
1.4.90		Penyelenggaraan Seleksi/Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa/Staf Desa	11.994.500,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.994.500,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	27.000.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	20.000.000,00	PBH
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.500,00	
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	19.867.500,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	5.000.000,00	PBH
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.500,00	
1.5.02	5.3.	Belanja Modal	4.867.500,00	
1.5.04		Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	2.000.000,00	PBH
1.5.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.008.957.090,82</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	100.708.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	59.951.500,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.951.500,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	8.227.500,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.227.500,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	1.390.000,00	DLL
2.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	390.000,00	
2.1.04	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	13.441.500,00	DLL
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.631.500,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	5.810.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	17.697.500,00	PBH
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.322.500,00	
2.1.09	5.3.	Belanja Modal	12.375.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	230.114.230,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	170.181.730,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	168.681.730,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	7.682.500,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.682.500,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	12.715.000,00	PBH
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.715.000,00	
2.2.92		Penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Berskala Lokal Desa	5.372.500,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.372.500,00	
2.2.93		Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	11.522.500,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.522.500,00	
2.2.97		Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Berskala Lokal Desa	22.640.000,00	DDS
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.640.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	328.838.350,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	264.338.350,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	264.338.350,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	45.000.000,00	PBH
2.3.20	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.500,00	
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	44.917.500,00	
2.3.95		Pembangunan/Penyediaan Sarana, Prasarana dan Kebutuhan Dasar Kebersihan	19.500.000,00	ADD
2.3.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	160.298.650,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	77.582.500,00	PBH
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.895.000,00	
2.4.03	5.3.	Belanja Modal	64.687.500,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	36.200.000,00	ADD
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.200.000,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	46.516.150,00	ADD
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	46.516.150,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.268.671,96	
2.5.93		Pengadaan /Pemeliharaan Angkutan Kebersihan/Persampahan Milik Desa	10.268.671,96	PBH
2.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.268.671,96	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	59.745.823,86	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	45.000.000,00	PBH
2.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	162.500,00	
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	44.837.500,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.418.755,11	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.418.755,11	
2.6.90		Penyediaan/Pengembangan/Pemeliharaan Website/Aplikasi Berbasis Desa	9.327.068,75	PAD
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.327.068,75	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	118.983.365,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	74.305.865,00	DDS
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.712.500,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	72.593.365,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	17.677.500,00	PBH
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.874.500,00	
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	6.803.000,00	
2.8.90		Penyelenggaraan Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi Manajemen Pengelola an Pariwisata Tingkat Desa	12.000.000,00	PBH
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.8.91		Dukungan Fasilitas Promosi Pariwisata Tingkat Desa	15.000.000,00	PBH
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>780.715.400,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	21.500.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	15.000.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	6.500.000,00	PBH
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	711.472.900,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	15.000.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	5.640.000,00	ADD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.640.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	78.102.500,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.402.500,00	
3.2.03	5.3.	Belanja Modal	1.700.000,00	
3.2.90		Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Adat/Keagamaan di Desa	172.176.000,00	PBH, PBK, PBP
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	172.176.000,00	
3.2.91		Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Prajuru Desa Adat/Banjar Adat/Subak/Pe muka Keagamaan	162.600.000,00	PBK, PBP
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	162.600.000,00	
3.2.92		Dukungan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana & Prasarana Kebudayaan/Subak/Bangunan	252.000.000,00	PBK
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	252.000.000,00	
3.2.93		Fasilitasi Penyuluhan/Pelatihan/Pelestarian Nilai-Nilai Budaya/Keagamaan di Desa	25.954.400,00	PBH
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.954.400,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	25.000.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota	10.000.000,00	ADD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Des a	10.000.000,00	PBH
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	22.742.500,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.742.500,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.742.500,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.90		Pembinaan Lembaga/Organisasi Perempuan/Wanita di Desa	5.000.000,00	PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>299.588.108,29</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	179.052.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	179.052.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	170.952.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	8.100.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	84.398.608,29	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	18.398.608,29	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.398.608,29	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	56.000.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	10.000.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.000.000,00	PBH
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5.000.000,00	PBH
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	26.137.500,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	17.845.000,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.845.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	8.292.500,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.292.500,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>75.080.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.080.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.080.000,00	ADD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.080.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.000.000,00	ADD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.464.654.611,23	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(398.476.621,23)	
6.		PEMBIAYAAN	498.476.621,23	
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	398.476.621,23	
		PEMBIAYAAN NETTO	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

29 December 2023
Perbekel Desa Talibeng

I Ketut Mudiasta
KECAMATAN SIDEM